

## TAJUK RENCANA

### Mempercantik Kawasan Malioboro

**MALIOBORO** terus berbenah dan mempercantik diri. Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian pun terus diujicobakan. Berbagai masukan dan kritik kiranya perlu dipertimbangkan demi keindahan Malioboro. Tak kalah penting, bagaimana menciptakan suasana agar wisatawan merasa nyaman dan aman berada di kawasan Malioboro. Harapannya, mereka akan membelanjakan uangnya, bukan saja di mal tapi juga pedagang kakilima yang sudah bertahun-tahun mengantungkan hidup di kawasan ini.

Kalaupun penutupan bagi kendaraan bermotor pada pagi hingga sore hari di kawasan ini dinilai kurang efektif, tentu bisa dievaluasi dengan memindahkan waktu sore hingga malam atau dini hari. Pasalnya, waktu sore atau malam dianggap sebagai *prime time* orang untuk berbelanja. Kita mendorong agar hal ini segera diujicobakan, sehingga akan terlihat kelebihan dan kekurangannya, termasuk soal boleh tidaknya bus besar masuk Kota Yogya.

Bila Malioboro memang hendak dijadikan kawasan pedestrian, konsekuensinya penataan parkir harus benar-benar diperhatikan. Sebab, meski berulang kali sudah ditertibkan, kenyataannya masih semrawut, belum lagi masih adanya oknum juru parkir yang memanfaatkan kesempatan dengan menarik ongkos parkir di luar kewajaran.

Kantong-kantong parkir menuju Malioboro harus dipersiapkan matang. Kalau hanya mengandalkan tempat parkir yang sudah ada, seperti di Jalan Abubakar Ali atau Beskalan misalnya, dikhawatirkan tak akan memadai, sehingga pemerintah harus mencari alternatif untuk mengatasinya. Kalau tidak, dipastikan lalu lintas di seputaran Malioboro bakal semrawut.

Menata Malioboro tentu tak bisa terpisah-pisah, melainkan harus kom-

prehensif, yakni sekaligus menata kawasan di sekitarnya. Misalnya di kawasan Jalan Margo Utomo yang kini makin ramai di malam hari. Bahkan, kawasan Jalan Margo Utomo kini menjadi daya tarik tersendiri karena sajian kuliner yang khas, mulai dari kopi jos, jadah bakar hingga beragam menu makanan yang harganya terjangkau.

Wisatawan dari arah utara sebelum memasuki Malioboro singgah dulu di kawasan Jalan Margo Utomo. Selanjutnya mudah diduga, jalanan menjadi padat, terutama di musim liburan. Bahkan, menjelang *weekend* kawasan ini sangat padat dan nyaris macet di malam hari. Sayangnya, petugas kurang sigap mengantisipasi. Terutama di sisi paling selatan yang berbatasan dengan perlintasan kereta api, kendaraan banyak yang diparkir memanfaatkan badan jalan.

Perkembangan terbaru, kendaraan yang diparkir tak hanya roda dua, tapi juga roda empat, terutama di lajur jalan barat ke timur yang mengarah ke Kleringan atau Jembatan Amarto, terlihat banyak kendaraan diparkir di sisi utara sebelum *traffic light*, sehingga jelas sangat mengganggu pengguna jalan. Padahal, di kawasan tersebut jelas-jelas dilarang parkir. Badan jalan yang sudah sempit inipun menjadi semakin sempit.

Kita mendesak agar Dinas Perhubungan dan instansi terkait bertindak tegas menertibkan parkir liar yang sungguh sangat mengganggu pengguna jalan. Kalau hanya untuk parkir sepeda motor, meski juga dilarang, mungkin tidak terlalu banyak makan badan jalan, namun kini kawasan tersebut sudah dimanfaatkan untuk parkir kendaraan roda empat, terutama malam hari. Akankah hal ini terus dibiarkan? Semestinya petugas bertindak tegas dan jangan pura-pura tidak tahu. □ - c

## Pertanian 4.0 : Dua Sudut Pandang

### Kadhung Prayoga

maupun kemampuan mengakses internet yang terbatas. Mampukah mereka menyesuaikan diri dengan perubahan ini?.

#### Sisi Petani Tua

Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas petani di Indonesia saat ini adalah petani yang sudah lanjut usia. Disitir dari Sutas BPS (2018) terdapat 33,4 juta petani dimana jumlah petani yang berumur 45

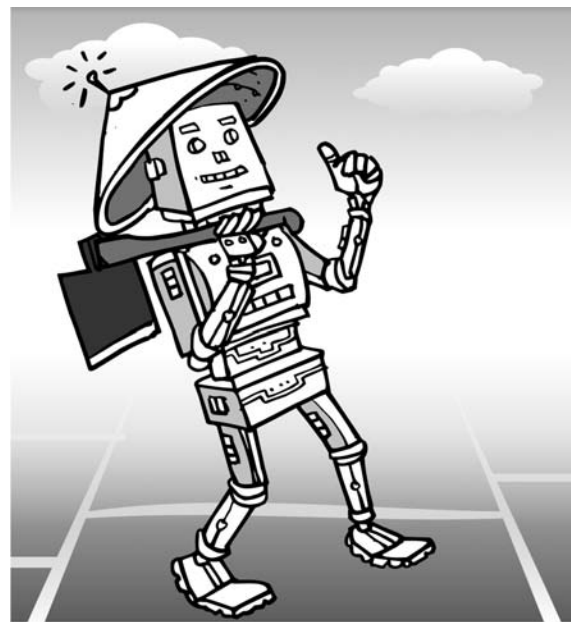
**R**EVOLUSI industri 4.0 telah menyentuh semua aspek kehidupan dan pekerjaan manusia. Digitalisasi dan canggihnya teknologi informasi menyebabkan budaya masyarakat bergeser dengan cepat. Dunia dalam genggaman menjadi sebuah keniscayaan, semua urusan manusia menjadi semakin mudah. Mulai dari mencari informasi, bekerja hingga urusan perut. Semuanya tinggal klik.

Salah satu sektor pekerjaan yang terkena imbas pemanfaatan teknologi informasi adalah sektor pertanian. Bagaimana sekarang petani bisa memanfaatkan robot, drone, maupun sensor untuk mengamati kondisi sawahnya, mengontrol air irigasi, atau sekadar menjaga tanaman dari hama. Dengan adanya citra satelit, petani bisa mengetahui kondisi hara tanah dan menentukan jarak tanam. Semua bisa dilakukan dengan mudah dari rumah, bahkan petani tidak perlu ke lahan.

Namun masalahnya, semua ini akan efektif untuk petani yang memiliki lahan luas. Lalu bagaimana dengan 15,8 juta petani yang menjadi mayoritas dengan kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 ha (Sutas BPS, 2018).

Beralih ke sektor hilir. Dulu petani selalu dipermankan tengkulak dan hanya bisa pasrah menerima kekalahan. Dengan adanya sosial media menjadikan petani bisa dengan mudah menjual produknya. Pemanfaatan *big data* bahkan bisa digunakan untuk memprediksi minat beli konsumen, menentukan segmentasi hingga memperkirakan jumlah produksi dari tahun ke tahun. *Cyber extension* juga hadir sebagai solusi terkait frekuensi penyuluhan yang kurang intensif karena jumlah penyuluh yang terbatas.

Bisa dibayangkan, menjadi petani di era digital sekarang sangat mengasyikkan. Tidak seperti dulu yang menjadi petani selalu dipandang rendah, kotor, dan miskin. Inilah masa dimana pertanian telah memasuki babak baru, yaitu pertanian 4.0. Meskipun begitu, keberadaannya masih meninggalkan banyak tanda tanya. Mengingat mayoritas petani yang sudah berumur tua, tingkat pendidikan yang rendah,



KR-JOKO SANTOSO

tahun ke atas sebanyak 17,7 juta petani. Dari 33,4 juta petani itu sendiri hanya ada 4,5 juta petani yang sudah mengakses internet. Pertanian 4.0 di satu sisi memberikan harapan, namun di sisi lain juga menimbulkan kegelisahan. Petani yang ada, diprediksi tidak akan bisa mengikuti perkembangannya karena rumitnya aplikasi yang digunakan. Apalagi dengan budaya petani tua yang malas jika harus mempelajari hal baru nan rumit.

Itu juga yang menjadi alasan kenapa *start up* digital di sektor pertanian banyak yang tidak laku. Fenomena yang terjadi justru petani hanya memanfaatkan sosial media seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* untuk berjualan atau mencari informasi. Jadi, pada dasarnya disini perlu adanya aplikasi ataupun layanan pendukung sejenis yang mudah dioperasikan.

## Betapa Mahalnya Korupsi

### S Djaja Laksana.

**B**ETAPA mahalnya ongkos seseorang untuk terpilih menjadi gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wawali, anggota DPR/Dewasa ini, tidaklah diragukan lagi. Umumnya para kandidat tidak mau mengatakan dana itu sebagai *money politic*, melainkan ngotot menyebutnya sebagai *political cost*.

Setelah terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) maupun terpilih ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa apalagi terpidana kasus korupsi, umumnya baru mengakui bahwa ada hubungan dengan jual-beli suara. Baik membayar mahar ke parpol dan/atau gabungan parpol pengusung, kampanye dan *menyawer* sembilan bahan pokok (sembako) maupun *angpauw* kepada para calon pemilihnya.

Banyak berita caleg yang gagal mengalami stres, depresi dan masuk rumah sakit jiwa. Tak sedikit caleg meminta kembali apa yang telah diberikan ke masyarakat, karena meyakini warga di situ tidak memilikinya. Alhasil, untuk menjadi koruptor dengan dukuk sebagai pejabat politik, perlu ongkos tidak sedikit. Besarnya jauh diatas gaji yang dia terima saat 5 tahun menjabat.

#### Penyakit Menular

Menjadi koruptor lewat cara menjadi pejabat publik yang berbiaya tinggi, juga membawa akibat yang harus ditanggung rakyat tidak terhitung. Kasus-kasus korupsi baru bisa diselesaikan belasan tahun. Hari ini Kedaulatan Rakyat edisi 20 Juni lalu misalnya, mengabarkan 4 anggota DPRD Gunungkidul yang korupsi dana APBD 2003-2004, baru bisa di eksekusi Rabu 19 Juni lalu.

Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap vonis Pengadilan Tipikor 3 Mei 2013. Bersama 29 anggota DPRD lain dan Sekretaris DPRD

Gunungkidul, mereka merugikan keuangan negara lebih dari Rp 3 miliar. Andai tak dikorup, uang bisa untuk menanggulangi putus sekolah, atau balita bergizi buruk (balita giber) yang menimbulkan *the lost generation*. Itu tak hanya terjadi di Gunungkidul, tapi juga di pusat dan banyak daerah lain.

Selama bertahun-tahun menjabat mereka tidak mungkin berkonsentrasi bekerja, karena menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Mereka juga tetap terima gaji/honorarium bulanan, tapi tidak bisa melayani dan menyejahterakan rakyat, sebagaimana mestinya. Bahkan ada anggota DPRD suatu daerah, ketika berkonsultasi ke pusat, atau dipanggil aparat hukum di atasnya, masih menggunakan surat perjalanan dinas yang dibiayai negara.

Uang lebih dari Rp 3 miliar, andai masuk bank setelah belasan tahun, menghasilkan bunga tidak sedikit. Kalau uang tak berputar (*tidur/idle*), nilainya jatuh terkaman inflasi. Lagipula mengingat mereka adalah pejabat publik yang punya kekuasaan, mudah mempengaruhi/mealarkan penyakit korupsi ke jajaran birokrasi, rekanan usaha dan lainnya. Dan andaikan mereka tidak melakukan politik uang, bisa jadi yang akan terpilih adalah orang yang lebih baik.

#### Musuh Bersama

Pada korupsi pejabat dengan 'melegalkan penjarahan' hutan, akan mewariskan lingkungan hidup yang rusak untuk generasi mendatang. Juga *the lost generation* akibat korupsi APBN/D, berupa buruk dan rendahnya kualitas sebagian generasi mu-

Karena kalau tidak, alih-alih mendapatkan manfaat pertanian 4.0, bisa saja justru posisi petani akan semakin lemah.

Sehingga, tugas pemerintah ada 2 yaitu: (1) mensinkronkan *whatsapp* atau *instagram* dengan aplikasi digital, dan (2) memfokuskan pada bagaimana penyuluh maupun petani bisa mengoperasikan internet dengan baik. Jika memang tidak bisa, maka bisa dilatih satu pemuda untuk tiap kelompok tani. Mereka bertugas sebagai penghubung antara petani tua dengan *marketplace*, maupun ruang digital yang lain. Sehingga, proses perpindahan informasi juga akan berjalan baik.

Semakin menurunnya minat pemuda untuk menjadi petani lambat laun bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selama ini penyebab menurunnya minat pemuda terhadap sektor pertanian lebih kepada bagaimana rendahnya pandangan masyarakat terhadap profesi petani. Kondisi petani yang banyak hidup di bawah garis kemiskinan, terbelakang, dan kurang melek teknologi. Di mata pemuda tidak ada prestise ketika harus menjadi petani.

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi bisa dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pamor sektor pertanian. Sosial media saat ini bahkan sudah menjadi medium bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada pemuda terkait perkembangan sektor pertanian dan daya saingnya. Sehingga bisa meningkatkan jumlah pemuda tani, karena saat ini dilansir dari Sutas BPS (2018) hanya terdapat 3,2 juta petani yang berumur di bawah 34 tahun. □ - c

**Kadhung Prayoga MSc.**,  
dosen Program Studi Agribisnis,  
Fakultas Peternakan dan Pertanian,  
Universitas Diponegoro.

#### Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih



## Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

### Paradigma Pengajaran Abad 21

**DIREKTORAT** Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program pelatihan pengajaran berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) bagi guru SMK. Program pelatihan ini sebagai salah satu strategi untuk menerapkan pengajaran berbasis HOTS. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam mengembangkan pelatihan dilakukan melalui MGMP Provinsi se-DIY.

Dikpora DIY bekerja sama dengan SEAMEO QITEP in Language mengadakan pelatihan Bimtek peningkatan dan pengembangan bagi guru-guru SMK se-DIY untuk meningkatkan kompetensi guru Bahasa Indonesia dan Inggris. Pelatihan dilaksanakan 24-27 Juni 2019 di Hotel Royal Darmo Malioboro Yogyakarta.

Paradigma pengajaran untuk menghadapi abad 21 sangat berat tantangan yang harus dihadapi, untuk itu perlu dipersiapkan sejak dini. Materi yang diberikan meliputi paradigma pengajaran abad 21, pengajaran pola pikir aras tinggi dalam konteks Sisdiknas, HOTS dalam pengajaran bahasa, konsep dan ilustrasi model pembelajaran berbasis teks, discovery, dan proyek.

Pengajaran abad 21 mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan mengutamakan keunggulan secara kompetitif. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru sangat diharapkan dalam mencapai kesempurnaan dalam penerapan pengajaran di sekolah.

Pelatihan yang diikuti 60 peserta dari MGMP Bahasa Indonesia dan Inggris dapat mentransformasi multilinguase dan multiliter.

Paradigma pengajaran abad 21 berorientasi pada kompetisi di masa depan. Mengantarkan peserta didik untuk dapat memenangkan kompetisi bukan hanya prestasi. Literasi itu proses tetapi dalam paradigma ini sudah menjadi eksen yang harus dilakukan. Bahasa tidak hanya muatan linguistik tetapi sekarang sudah menjadi muatan ekonomi dan politik yang dapat menganalisis, mengasosiasikan dalam konteks kekinian.

Jadi kecenderungan makro pengajaran abad 21 pendidik tidak harus tatap muka, tren yang diadopsi sekarang literasi (finansial literasi) kemampuan yang diperoleh melalui akademik sebagai bekal yang sudah mengarah ke ekonomi dan politik untuk peserta didik SMK di masa datang. □ - c

**Erna Nurul Huda SPd**  
Guru SMKN 3 Yogya.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** dr Gun Nugroho Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Oeto Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Musahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Sihono HT, Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSL, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)-565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 565660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrky23@yahoo.com](mailto:iklankrky23@yahoo.com), [iklankrky13@gmail.com](mailto:iklankrky13@gmail.com).  
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Clik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek. 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

**Pewakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.  
**Surakarta:** Jalan Letjen Sutuyo No 2 Rejosari RT 6 / RW 15 Kelurahan Gilingan Banjarsari Solo, Telp (0271) 2934878. Kepala Perwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.  
**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.  
**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.  
**Purworejo:** Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprato SPd, Kepala Biro: Gunarwan.  
**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro : Asrul Sani.  
**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.